



LAPORAN KINERJA (LKj)

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bantul
Tahun 2017**

Kata Pengantar

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2017 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2017, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul, Maret 2018



Drs. Eddy Susanto
NIP. 1961102081984031005

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
3. Sumber Daya Manusia	3
4. Isu Strategis.....	6
5. Sistematika Laporan	7
BAB II 8	
PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja(PK)	11
C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	14
BAB III 25	
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja	25
B. Evaluasi dan Analisis.....	32
Penutup.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Kabupaten Bantul disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 17 program 37 kegiatan pada tahun 2016 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Perdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 113 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a) FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 113 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, mempunyai :

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
- d. Pelaksanaan kesekretariatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Kepala Sub Bagian Program
- c. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - 1) Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
 - 2) Kepala Seksi Tuna Sosial dan Korban Napza
- d. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
 - 1) Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - 1) Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat

- 2) Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender: dan
 - 2) Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

3. Sumber Daya Manusia

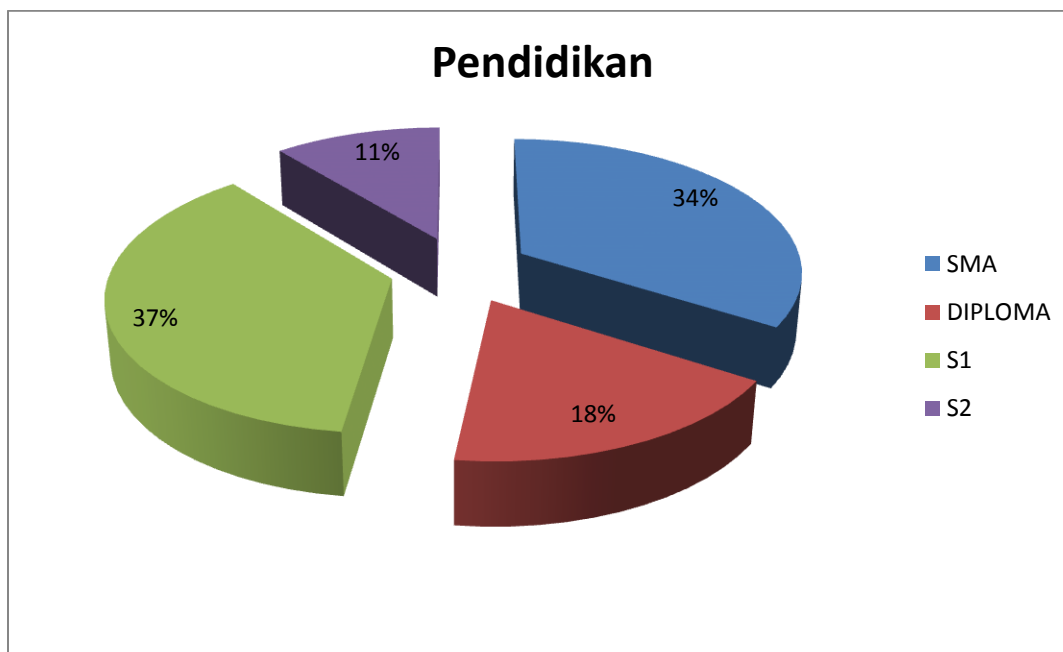
1. Data Pegawai Dinas Sosial

Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Sosial tahun 2016

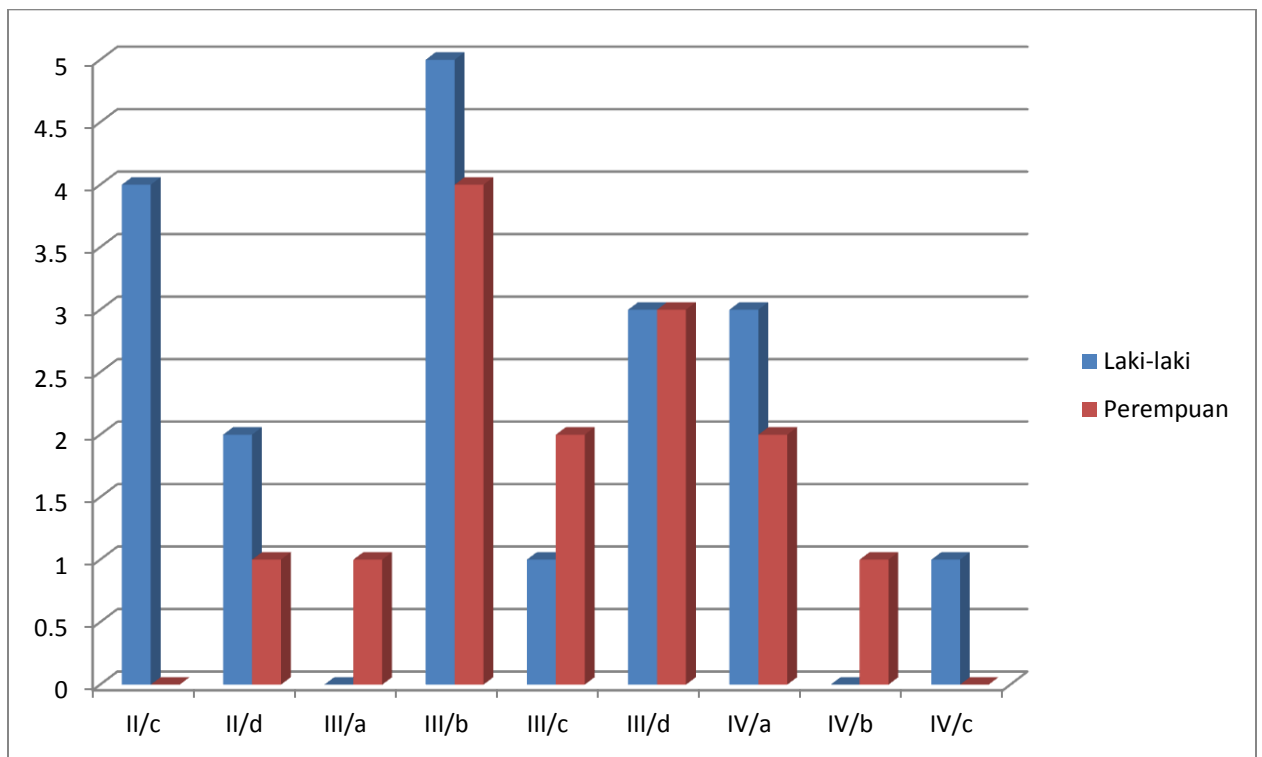
No	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA/ K	Diplo ma	S1	S2	
1.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	II/c	4	-	-	-	3	1	-	-	4
4.	II/d	2	1	-	-	-	3	-	-	3
5.	III/a	-	1	-	-	1	-	-	-	1
6.	III/b	5	4	-	-	7	-	2	-	9
7.	III/c	1	2	-	-	-	1	7	-	8
8.	III/d	3	3	-	-	-	1	5	-	6
9.	IV/a	3	2	-	-	-	-	2	3	5
10.	IV/b	-	1	-	-	-	-	1	-	1
11.	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	19	14	0	0	11	6	12	4	38

Sumber Data : Sekretariat Dinas Sosial

Perbandingan tingkat pendidikan PNS di Dinas Sosial Kab. Bantul



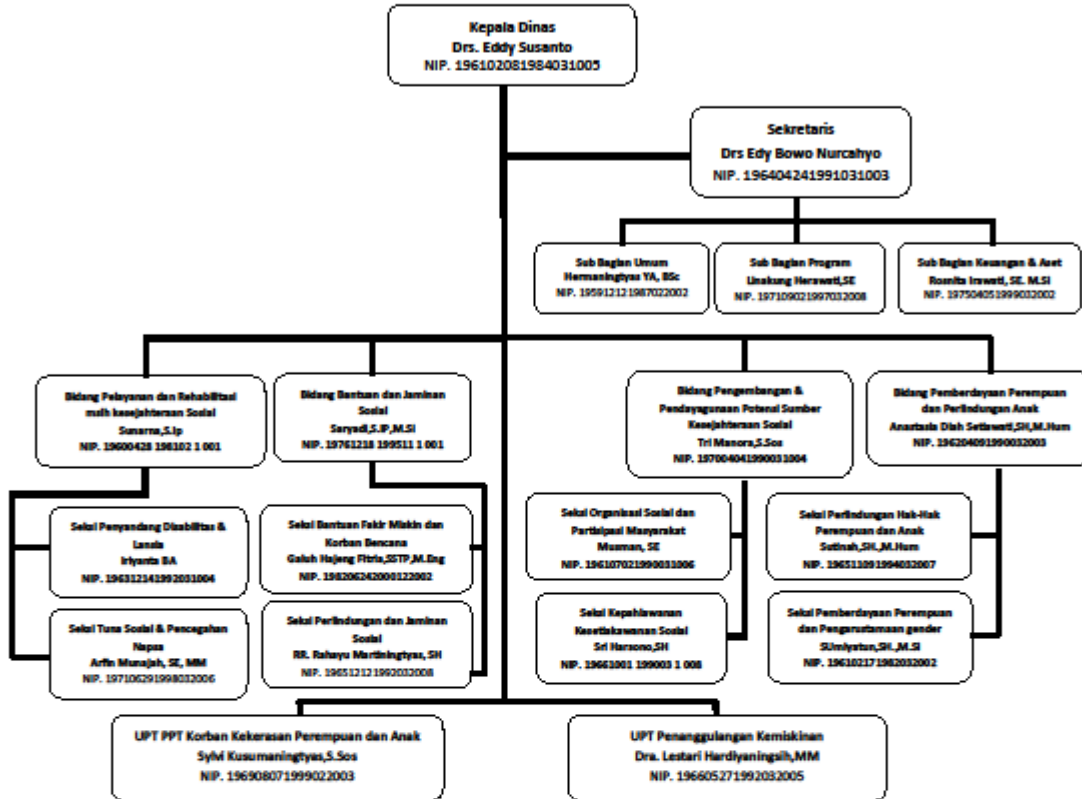
Perbandingan tingkat pendidikan dan jenis kelamin PNS Dinas Sosial Kab Bantul



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2017



4. Isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki SDM yang yang relatif terbatas, jumlah seluruh karyawan ada 38 dengan rincian petugas struktural sebanyak 19 orang dan staf 19 orang, namun tidak seorang staf yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial. Sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan sosial khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Tidak adanya panti sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala dan mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan. Hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjangkauan yang dilakukan dinsos dengan instansi terkait. Untuk itu kepemilikan panti sosial oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul .

Secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :

1. Tidak ada petugas fungsional kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pendampingan kepada PMKS mengakibatkan tidak tuntasnya penanganan kesejahteraan sosial;
2. Update data PMKS belum bisa efektif dilaksanakan, karena selama ini update data dilakukan oleh Dinas Sosial DIY
3. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
4. Belum adanya panti sosial milik pemerintah daerah mengakibatkan terkendalanya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya;
6. Perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
7. Makin tingginya angka Kekerasan terhadap perempuan dan Anak baik dalam Rumah tangga maupun di

5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan serta sistematika penyajian;
- Bab II : Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, dan Program untuk pencapaian sasaran;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2017, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
- Bab IV : Penutup
Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2017-2021, visi Dinas Sosial adalah

“Terwujudnya Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul ”

2. MISI

Dengan mengacu pada misi RPJMD 2017-2021 terutama pada misi Kabupaten Bantul ke 2, 3 dan 5, maka misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat, lembaga sosial, kelompok rentan, dan korban bencana serta upaya memperkecil kesenjangan sosial
2. Meningkatkan usia hidup, harkat dan martabat serta kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3. Mencegah, menangani, merehabilitasi dan menurunkan kekerasan di masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, dalam kesetaraan dan keadilan gender

3. Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial, Strategi dan kebijakan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

1.1. Misi 1 Mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat, lembaga sosial, kelompok rentan, dan korban bencana serta upaya memperkecil kesenjangan sosial

Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat, lembaga sosial, kelompok rentan, dan korban bencana serta upaya memperkecil kesenjangan sosial :

- a. Memberdayakan fakir miskin kelompok rentan menuju terwujudnya sumber daya manusia yang produktif dan mandiri
- b. Tersedianya jaminan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan

Strateginya adalah Memberdayakan fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif

Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan system Bantuan dan Jaminan Sosial bagi fakir miskin, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.2. Misi 2 Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, trampil dan berkepribadian luhur

Tujuan : Menciptakan kondisi untuk mengurangi tindak kekerasan eksploitasi dan perlakuan yang salah pada kelompok rentan, serta mengurangi beban korban bencana agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah, dengan **sasaran** :

- a. Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penanganan korban bencana, dan masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana

Strateginya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana, dan kebijakan yang diambil dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana

1.3. Misi 3 Mencegah, menangani, merehabilitasi dan menurunkan kekerasan di masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, dalam kesetaraan dan keadilan gender

Tujuan : Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran : Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga.

Strategi yang dilakukan :

- a. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumberdaya manusia yang produktif.
- b. Terlindunginya anak, lanjut usia dan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah;
- c. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba
- d. Pulihnya, terbebasnya dan pemberdayaan anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba

Kebijakan :

- a. Memperluas aksesibilitas yang mengarah pada kegiatan kewirausahaan
- b. Meningkatkan pemahaman tentang tindak kekerasan dan perilaku salah bagi anak-anak dan lansia
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba
- d. Melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Bantul dalam

berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Berkurangnya Pengguna NAPZA	Presentase Penanganan NAPZA
2.	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS
3	Menurunnya Rasio Kekerasan dalam RumahTangga	Persentase kekerasan dalam Rumah Tangga

B. Perjanjian Kinerja(PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama beserta target kinerja dan tahun anggaran. Penyusunan PK tahun 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD RKPD 2017, IKU dan APBD.Perjanjian Kinerja ini disusun setelah dilantiknya Bupati terpilih tahun 2016 – 2021. Dinas Sosial Kab Bantul telah menetapkan PK tahun 2017 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bantul
Jln. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul Yogyakarta 55714 Telp / Fax 6469008
Website : <http://sosial.bantulkab.go.id> ; posel : sosial@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

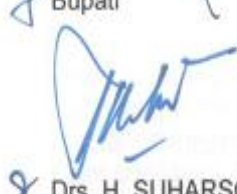
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

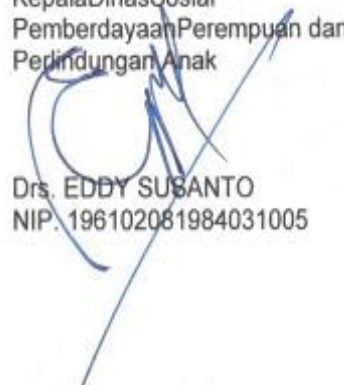
Nama : Drs. Eddy Susanto
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati

Drs. H. SUHARSONO

Bantul, Januari 2018
Pihak Pertama
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Drs. EDDY SUSANTO
NIP. 196102081984031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANTUL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	13,25
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan perempuan dan anak	%	0,38

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Pelayanan <i>Administrasi</i> Perkantoran	1.146.111.265,00	Anggaran APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.258.990.200,00	Anggaran APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.000.000,00	Anggaran APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	8.161.100,00	Anggaran APBD
5.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	385.251.500,00	Anggaran APBD
6.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.565.419.950,00	Anggaran APBD
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.254.715.000,00	Anggaran APBD
8.	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	1.377.958.250,00	Anggaran APBD
9.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.802.085.000,00	Anggaran APBD
10.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	55.700.000,00	Anggaran APBD
11.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	481.895.000,00	Anggaran APBD
12.	Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	144.785.000,00	Anggaran APBD
	Jumlah	9.545.072.265,00	

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua
Bupati



Drs. H. SUHARSONO

Pihak Pertama
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Drs. EDDY SUSANTO

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, maka disusunlah program/kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program: Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	
	Kegiatan :	
	a Peningkatan Kapasitas pendamping sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya.	854.690.000,00
	b Penyusunan Data dan Analisis Pemasalahan PMKS	235.577.000,00
	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	933.812.400,00
2	Program: Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	Kegiatan :	
	a Peningkatan kualitas Kampanye Sosial, pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan Sosial bagi PMKS.	603.608.500,00
3	Program Keserasian kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	
	Kegiatan :	
	a Perumusan Kebijakan Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	146.000.000,00
	b Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	80.000.000,00
	c Pengembangan Kabupaten Layak Anak	100.000.000,00
	d Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	24.120.000,00
	e Operasional Gabungan Organisasi Wanita	44.000.000,00
	f Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	56.000.000,00
	g Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	40.900.000,00
4	Program : Peningkatan Peran Serta	

	Kepemudaan	
	Kegiatan :	
	Pembinaan Organisasi kepemudaan dan Peningkatan peran serta pemuda	211.385.000,00
5	Program : Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	
	Kegiatan :	
	a Pelaksanaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	239.465.000,00
	b Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Monumen	100.000.000,00
6	Program Pengembangan data /informasi/statistik daerah	
	Kegiatan:	
	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	240.312.500,00
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	Kegiatan:	
	a Penyusunan data terpilah dan sistim informasi gender dan anak	10.000.000,00
	b Pelatihan Penigkatan Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak	40.000.000,00
8	Progrm Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda	
	Kegiatan :	
	Pengembangan potensi pemuda	230.000.000,00
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
	Kegiatan:	
	A Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	234.650.000,00
	b Forum Penanganan Kekerasan	35.000.000,00
	c Pemberdayaan Perempuan dan Anak	15.000.000,00
	d Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	27.000.000,00
	e Pelaksanaan kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	50.000.000,00
10.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
	Kegiatan :	
	a Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	388.215.000,00
	b Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	70.000.000,00
11.	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	
	Kegiatan :	

	Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana	84.325.000,00
12.	Program :Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan :	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	188.044.000,00
13.	Program :Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan :	
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	198.500.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial tahun 2016, ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Inputs (masukan)
2. Outputs (keluaran)
3. Outcomes (hasil)
4. Benefits (manfaat)
5. Impacts (dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2016.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2016 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2017.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam tahun 2017 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2017 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Berkurangnya pengguna NAPZA	Persentase penanganan NAPZA	4 %	8%	Sangat berhasil
2.	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS	13,5%	14%	Sangat berhasil
3	Menurunnya Rasio Kekerasan dalam RumahTangga	Menurunnyakekerasan dalam Rumah Tangga	0,38		

3. Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Predikat nilai capaian sasaran strategis dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No	Capaian	Keterangan
	85 % - 100 %	Sangat Berhasil
	$70\% < X \leq 85\%$	Berhasil
	$55\% < X \leq 70\%$	Cukup Berhasil
	$\leq 55\%$	Tidak Berhasil

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Capaian	Interval (%)			
						Sangat Berhasil Lebih dari 85	Berhasil 70 s.d. 85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang Berhasil < 55
1.	Berkurangnya Penanganan NAPZA	Persentase Penanganan NAPZA		4%	8%	200			
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	3000 orang	3255 orang	108			
2.	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS		13.5 %	14 %	103			
			1. Sosialisasi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi gakin	102275	151.361	100			

			Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan Prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS	146 orang	146 orang	100			
			Fasilitasi anak yatim	3500 anak	3.200 anak	100			
			Penanganan jenazah terlantar	30 orang	53 orang	176			
			Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi penanganan permasalahan lansia	9 kegiatan	9 kegiatan	100			
			Peningkatan kapasitas kepemudaan	3 kegiatan	4 kegiatan	133			
			Pendampingan program nasional JS Paca dan JSLU	538 orang	538 orang	100			
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan	14 kegiatan	12 kegiatan	86			

			social masyarakat						
			Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial nasional	1300 orang	1300 orang	100			
			Fasilitasi pemantauan dan penyaluran bantuan bencana	100 %	100 %	100			
			Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya	200	63	31,5			
3	Rasio kekerasan perempuan dan anak	Rasio kekerasan perempuan dan anak	Pelaksanaan Kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)						
			Pemberdayaan Perempuan dan Anak						
			Forum Perlindungan Korban Kekerasan						
			Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul						
			Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan						
			Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender,						

			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
			Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha						
			Pengembangan Kabupaten Layak Anak						
			Operasional Gabungan Organisasi Wanita						
			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
			Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						
			Penunjang Kegiatan Dharma Wanita						
			Penyusunan Data pilah dan Sistem Informasi Gender dan Anak						
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak						

Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan (formulir PKK) atas 47 (empat puluh tujuh) kegiatan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dan pengukuran pencapaian sasaran (formulir PPS) atas 14 (empat belas) sasaran.

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Nilai Capaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Jumlah Sasaran
1	Diatas 85	Sangat Berhasil	15
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	2
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	1
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	1
	Jumlah		19

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup berhasil : 62,5

Tidak berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.**

B. Evaluasi dan Analisis

Dinas Sosial merupakan lembaga baru dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Bantul. Sebagai lembaga baru dibutuhkan kekompakan dan kerja keras guna membangun koordinasi internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dengan lembaga organisasi masyarakat. Pencapaian target kinerja didasarkan pada pelaksanaan program Dinas Sosial yang disinergikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Sosial merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini merupakan pelaporan kinerja bertolok ukur renstra yang dibuat dari periode Renstra Dinas Sosial (2017 – 2021).

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017, Kepala Dinas Sosial di bantu oleh 4 (tiga) bidang dimana masing-masing bidang di bantu oleh 2 (dua) seksi. Pelaksanaan pencapaian kinerja berjalan relatif lancar dan sedekat mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran1 : Persentase Penanganan NAPZA

Sasaran tersebut diampu oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk mewujudkan misi 5, yaitu : **“Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial”**, dan tujuan 5 yaitu : **“Menciptakan kondisi masyarakat yang mampu memberikan peran dan prakarsa untuk membangun kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial di masyarakat.”**

Indikator Kinerja Utama : Berkurangnya pengguna NAPZA

Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2016

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisa si 2016	Target 2017	Realis asi 2017	Nilai capaian (%)	Katego ri
1	Berkurangnya pengguna napza	Persentase penanganan napza	8	4	8	200	Sangat Berhasil
		Jumlah peserta penyuluhan tentang bahaya narkotika dan miras	3255 orang	4300 orang	4331 orang	108	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 1 yaitu **“Berkurangnya pengguna napza”** terdiri dari satu kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 92.5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan :

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang upaya dari masyarakat, sekolah dan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial dalam rangka sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bantul, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini menargetkan 4.300 orang mengikuti penyuluhan P4GN dan realisasi kegiatan sebanyak 3.331 orang sehingga capaiannya adalah 108% (sangat berhasil). Capaian angka yang sangat

tinggi ini didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi untuk meminta penyuluhan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dan Badan Narkotika Kabupaten Bantul. Masyarakat mengajukan permohonan dan akan difasilitasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran strategis 2 : Berkurangnya PMKS

Sasaran tersebut diampu oleh Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial untuk mewujudkan misi 1, yaitu : **“Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan dan pemberdayaan”**., dan tujuan 1, yakni : **“Mewujudkan keseimbangan kehidupan sosial di masyarakat dengan mengurangi beban keluarga miskin melalui pemberian bantuan dan pemberdayaan kepada kelompok atau perorangan “**.

Indikator Kinerja Utama : Persentase PMKS

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran berkurangnya PMKS adalah :

Program :

1. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Kegiatan : Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Keluarga Miskin.

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.1 tahun 2017

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai capaian (%)	Kategori
1.	Berkurangnya	Persentase					

	PMKS	PMKS					
		-Raskin	88.611 RTSPM	97.472 RTSPM	97.472 RTSPM	100	Sangat Berhasil
		-KUBE	90 klp	20 klp	42 klp	900	Sangat Berhasil
		-PKH	61.877 KPM	33.168 RTSM	58.643 KPM	515	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Dari tabel III.6 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.1 dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran tersebut dicapai melalui program: Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, dengan kegiatan: Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Keluarga Miskin. Adapun sub-sub kegiatannya adalah :

Distribusi Rastra.

Kegiatan distribusi rastra selama 12 (duabelas) bulan kepada 97.472 RTS PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang tersebar di 933 dusun dengan bantuan 15 kg/RTS-PM/bln, Total bantuan 15.949.980 kg senilai Rp. 25.519.968.000,00 yang diterimakan adalah telah diterimakan sebanyak 12 kali, sehingga capaian kinerjanya 100 %.



➤ Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program ini diperuntukkan bagi KUBE yang dalam kategori “baik”, sehingga hanya diberikan kepada 42 kelompok KUBE PKH dan 20 kelompok (200 KK) KUBE FM. Untuk masing masing KK mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 2.000.000,-. Total bantuan yang diterimakan adalah Rp. 1.746.000.000,00
Capaian kinerja sasaran untuk KUBE adalah 900%. Jumlah kelompok penerima KUBE ditentukan oleh propinsi, selaku pengelola dana dekonsentrasi yang disalurkan kepada kelompok KUBE.

➤ Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini di berikan kepada keluarga miskin di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Bantul, Penerima PKH adalah keluarga miskin dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun. Karena adanya perluasan cakupan penerima PKH dari keluarga sangat miskin menjadi keluarga miskin, maka yang semula tahun 2016 ditargetkan penerima sejumlah 12.000 RTSM terjadi dua kali penambahan, yang pertama 16.550 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kedua 32.398 KPM sehingga penerima PKH menjadi sejumlah

58.643 KPM dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 115.223.740.000,00. Capaian kinerja sasaran untuk PKH adalah 515 %.



Doc Bid 2 : Sosialisasi PKH

2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
- b. Fasilitasi anak yatim piatu
- c. Penanganan jenazah terlantar
- d. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Lansia

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.2 tahun 2017

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai capaian (%)	Kategori
1	Berkurangnya	Persentase PMKS					

	PMKS						
		Penanganan PMKS melalui kegiatan :					
		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS		146 orang	146 orang	100	Sangat berhasil
		Pendampingan Anak Yatim Piatu	3200 anak	3500 anak	3200 anak	91	Sangat Berhasil
		Penangan Jenazah terlantar	30 orang	40	20	50	Sangat Berhasil
		Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Lansia		9 kegiatan	9 kegiatan	100	Sangat berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = $(4 \times 92,5) / 4 = 92,5$

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1.2 sebesar = 92,5

Dari tabel III.7 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.2 : terdiri dari 4 kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran tersebut dicapai melalui program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 4 kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi PMKS masalah kejiwaan (penderita psikotik) untuk mendapatkan rehabilitasi di rumah sakit jiwa serta memberikan pelayanan rehabilitasi bagi PMKS ke panti-panti social sesuai kebutuhan klien. Kegiatan ini menargetkan 146 orang realisasi sebanyak 146 orang sehingga capaiannya 100 %. (sangat berhasil)

b. Fasilitasi anak yatim piatu

Kegiatan ini untuk memberikan fasilitasi pendidikan dan memupuk rasa percaya diri serta menambah ketebalan iman dan taqwa kepada Allah, Tuhan YME. Kegiatan ini menargetkan 3.500 anak yatim/piatu ,realisasi yang diperoleh adalah 3.200 anak sehingga capaiannya 91 %. (sangat berhasil)

c. Penanganan jenazah terlantar

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menangani perawatan dan pemakaman jenazah terlantar yang ditemukan di wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini menargetkan 100% jenazah tertangani, realisasi yang diperoleh sebanyak 53 jenazah terlantar ditangani sehingga capaiannya 100 % (sangat berhasil).



Doc Bidang 1 : Penanganan jenazah terlantar

d. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Lansia

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lansia di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini menargetkan pelaksanaan asistensi social bagi lansia 9 kali, realisasinya 9 kali sehingga capaiannya 100 % (sangatberhasil)

3. Program : Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

Kegiatan :

- a. Pendampingan Program Nasional Jaminan Sosial bagi Penca Berat dan Lansia.

Tabel III.8 Pencapaian Kinerja Sasaran2.3 tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai capaian (%)	Kategori
1.	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS					
		Penanganan PMKS melalui kegiatan:					
		Pendampingan Program Nasional Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat dan Berat dan JSLU.	840 orang	574 orang	543 orang	146	Sangat berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = (1x92,5) = 92,5

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 sebesar = 92,5

Dari tabel III.8 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.3: **Tersedianya jaminan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan**, terdiri dari dua kegiatan berdasarkan hasil pengukuran

kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran tersebut dicapai melalui program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan kegiatan :

- a) Pendampingan Program Nasional Jaminan Sosial bagi Penca Berat dan JSLU Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat dan kriteria penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan (ASODK) dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), agar pemberian bantuan untuk Penca dan Lanjut Usia melalui program bantuan ASODK dan ASLUT tepat sasaran dan manfaat. Kegiatan ini menargetkan 574 orang, realisasisejumlah 543 orang sehingga capaiannya 146,34 % (sangat berhasil).

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.4 tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai capaian (%)	Kategori
1	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS					
		Penanganan PMKS melalui kegiatan :					
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	4 keg	5 keg	5 keg	100	Sangat Berhasil

		Masyarakat					
		Peningkatan kualitas kesetiakawanan social nasional	2.500 orang	1.300 orang	1.300 orang	100	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = $(2 \times 92,5) / 2 = 92,5$

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis2 sebesar = 92,5

Dari tabel III.9 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.4 terdiri dari dua kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ini dicapai melalui 2 kegiatan yaitu :

- a. Terselenggaranya pembinaan dan pemilihan PSM, TKSK, Orsos dan WKSBM berprestasi di Kabupaten Bantul

Kegiatan ini untuk pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos), WKSBM, TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Bantul. Orsos berprestasi tahun 2017 ini diraih LKS/LKSA Gotong royong, Jaranan Panggungharjo Sewon dan yang berhasil meraih juara III di tingkat DIY. Sedangkan untuk PSM berprestasi atas nama Sungatifah, dari Karangsemut, Trimulyo, Jetis. PSM berprestasi Tingkat DIY atas nama Arif Subawanto, A.Md dari Desa Guosari, Pajangan, Bantul. TKSK berprestasi diraih oleh Sdr. Junaidi Supriyanto dari Kecamatan Sewon. Kegiatan inimenargetkan 5 kegiatan, realisasi yang diperoleh 5 kegiatan sehingga capaiannya 100 % (sangat berhasil).

- b. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ikut serta dengan pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial. Target peserta sebanyak 1.300 orang, yang akan mengikuti berbagai kegiatan seperti : sarasehan, senam serta jalan sehat. Realisasi sebanyak 1.300 orang dari mitra kerja, mitra binaan dan masyarakat umum, sehingga capaiannya 100 % (sangat berhasil).

5. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kepemudaan

Tabel III.10 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.5tahun 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai capaian (%)	Kategori
1.	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS					
		Penanganan PMKS melalui :					
		Pemilihan Karang Taruna Berprestasi	3 KT berprestasi	3 KT berprestasi	3 KT berprestasi	100	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = $(1 \times 92,5) / 1 = 92,5$
 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1.5 sebesar = 92,5

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2 terdiri dari satu kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ini dicapai melalui 1 kegiatan yaitu : Pemilihan Karang Taruna Berprestasi.

Kegiatan ini meliputi pembinaan, monitoring, evaluasi dan seleksi calon peserta lomba baik tingkat kabupaten, propinsi bahkan tingkat nasional. Untuk tahun 2017 ini Karang Taruna Berprestasi Kabupaten Bantul diraih oleh Karang Taruna Dipo Ratna Muda dari Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, dan meraih Nominasi I di tingkat propinsi. Selanjutnya mewakili DIY maju ke Tingkat Nasional dan meraih Peringkat I. Bulan Bhakti Karang Taruna tahun 2016 diperingati dengan sarasehan dan jalan sehat. Kegiatan ini menargetkan 3 KT berprestasi, realisasi yang diperoleh 3 KT sehingga capaiannya 100% (sangat berhasil)

6. Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Kegiatan : Fasilitasi Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana.

Tabel III.11 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.6 tahun 2017

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisa si 2016	Target 2017	Realis asi 2017	Nilai capaian (%)	Katego ri
	Berkurangnya PMKS	Persentase PMKS					
		Penanganan melalui Kegiatan :					
		Fasilitasi pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	90 KK	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = $(1 \times 92,5) / 1 = 92,5$
 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 sebesar = 92,5

Dari tabel III.11 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.6 terdiri dari satu kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Fasilitasi Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana. Korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS, yang merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai. Pemberian bantuan kepada korban bencana berupa beras, minyak, saos, kecap, sarden, matras dll. Kegiatan ini adalah untuk mengampu penyaluran bantuan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Ditargetkan 100 % dari total korban bencana yang terjadi di

Kabupaten Bantul mendapatkan fasilitas pemantauan dan penyaluran bantuan bencana. Realisasi dari target tersebut adalah 100 % sehingga capaiannya adalah 100%.

7. Program : Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial

Kegiatan : Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya.

Tabel III.12 Pencapaian Kinerja Sasaran 2.7 tahun 2017

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai Capaian (%)	Kategori
1	Berkurangnya PMKS	Prosentase PMKS					
		Penanganan melalui kegiatan :					
		Penjangkauan anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya.	32 orang	200 orang	39 orang	32	Tidak berhasil

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kab. Bantul

Capaian sasaran (kategori tidak berhasil) = $(1 \times 27,5) = 27,5$

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 sebesar = 27.5

Dari tabel III.12 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 2.7 yaitu : **Berkurangnya PMKS** terdiri dari satu kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 27.5 termasuk kategori **tidak berhasil**.

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan:

1. Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya.

Kegiatan penjangkauan anjal, gepeng dan penyakit social lainnya dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Bantul dan Polres Bantul. Hasil dari penjangkauan tersebut kemudian dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Untuk anjal gepeng yang berasal dari luar Bantul ditangani secara kerjasama dengan Dinas Sosial DIY untuk dilakukan pembinaan dan dikembalikan ke daerah asal. Sedangkan untuk anjal gepeng yang merupakan warga Bantul diberi pelatihan ketrampilan dan modal usaha. Kegiatan ini menargetkan 200 orang, realisasi yang diperoleh 63 orang sehingga capaiannya 31,5% (kurang berhasil). Permasalahannya adalah karena situasi dan kondisi di lapangan yang tidak dapat diprediksi serta adanya alat komunikasi HP yang digunakan klien untuk menghubungi temannya di lokasi lain.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

8. Program : Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Kegiatan :

a) Pelaksanaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

b) Pemeliharaan makam pahlawandan monumen

Tabel III.13 Pencapaian kinerja bidang agama tahun 2017

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Nilai Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama untuk menambah ketaqwaan terhadap Tuhan	1.Meningkatnya frekuensi kegiatan keagamaan di masyarakat					
	YME melalui kegiatan	Penanganan melalui kegiatan :					

	keagamaan	1.Pelaksanaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan					
		Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	3 desa	3 Desa	3 Desa	100	Sangat Berhasil
			12 kali	14 kali	14 kali	100	Sangat Berhasil
			6 kali	6 kali	6 kali	100	Sangat Berhasil
			615 orang	668orang	668ora ng	100	Sangat Berhasil
			2 kali	2 kali	2 kali	100	Sangat Berhasil
				1 kali	1 kali	100	Sangat berhasil
				10 kali	10 kali	100	Sangat Berhasil
				2 kali	2 kali	100	Sangat berhasil
		3.Pemeliharaan makam Pahlawan dan Monumen	4 lokasi	12 kali	12 kali	100	Sangat Berhasil

Capaian sasaran (kategori sangat berhasil) = $(11 \times 92,5) / 11 = 92,5$
Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 6 sebesar = 92,5

Dari tabel III.13 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama untuk menambah ketaqwaan terhadap Tuhan YME melalui kegiatan keagamaan”** terdiri dari lima indikator sasaran berdasarkan hasil

pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 termasuk kategori **sangat berhasil**.

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan :

1) Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya

a) Penyelenggaraan DBKS

Kegiatan ini meliputi penancangan 3 Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), pembinaan di 3 Desa Binaan Keluarga Sakinah dan evaluasi yang juga di 3 Desa Binaan Keluarga Sakinah (100%). Untuk tahun 2016 desa yang dicanangkan oleh Bupati Bantul adalah Desa Selopamiro Kec. Imogiri, Desa Potorono Kec. Banguntapan dan Desa Tirtosari Kec. Kretek. Desa Wirokerten Kec. Banguntapan mewakili Kabupaten Bantul maju evaluasi DBKS DIY dan meraih peringkat ke 3.

2) Fasilitasi pemeliharaan monumen dan makam pahlawan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi fisik bangunan Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Bantul yang bersih, rapi dan indah. Untuk mendukung hal tersebut maka diadakan 2 buah mesin pompa air kecil yang dipinjamkan kepada Pengelola Makam Pahlawan tersebut. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 12 kali Realisasi 12 kali capaiannya adalah 100 %.

9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Melalui kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dilakukan Verifikasi dan validasi data PBI jaminan kesehatan nasional sesuai Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan PBI Jamkes Tahun 2014. Validasi dilaksanakan untuk memverifikasi penerima PBI JKN sebanyak 500.101 jiwa se-Kabupaten setiap enam bulan sekali, sesuai aturan dari Kemensos. Tahun 2017 Dinas Sosial telah melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap kepesertaan PBI JKN yang diawali dengan musyawarah desa untuk update data kepesertaan yang meninggal, pindah, ganda, mampu maupun data tidak ditemukan kemudian mengusulkan penggantinya. Target pelaksanaan verifikasi terlaksana sehingga capaian 100%



Doc: Sekretariat; Sosialisasi validasi dan verifikasi jaminan kesematan

A. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial selama tahun anggaran 2017, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi APBD

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam APBD Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2017 untuk Belanja dari anggaran sebesar Rp 10.223.854.700,- terealisasi Rp 9.736.747.952,- sisa Rp 487.106.748,- atau realisasi capaiannya adalah 95,24%.

Belanja tersebut di dalamnya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Pengeluaran belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2017 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:

Tabel III.14 Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Sosial kab Bantul Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.537.956.600,-	2.449.476.211,-
2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.706,100,-	7.056.054.741,-

4	Belanja Modal	235.192.000,-	231.217.000,-
	Jumlah	10.223.854.700,-	9.736.747.952,-

1. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2017, Dinas Sosial telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel III.15 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bidang
1	Program Administrasi Perkantoran	297,700,700	287,047,359	96.42	Sekretariat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	203,400,000	196,969,600	96.84	Sekretariat
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24,449,500	17,361,000	71.01	Sekretariat
4	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	450,169,750	431,685,250	95.89	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
5	Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Keluarga Miskin	820.234.000	770,409,500	93.93	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	307,678,000	298,733,000	97.09	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
7	Fasilitasi Anak Yatim Piatu	852,000,000	838,550,000	98.42	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
8	Penanganan Jenazah Terlantar	72,080,000	71,930,000	99.79	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
9	Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Lansia	68,250,000	66,842,500	97.94	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
10	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	168,870,000	167,625,000	99.26	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
11	Pelaksanaan Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya	2,311,135,000	2,092,735,050	90.55	Bidang Pengembangan Sosial dan

	dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan				Agama
12	Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh	196,740,000	195,660,000	99.45	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
13	Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Monumen	22,000,000	22,000,000	100	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
14	Pemberdayaan Kaum Rois dan Penjaga Masjid	800,212,500	766,470,000	95.78	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
15	Pelatihan Manajemen Pengelola Tempat Ibadah	72,852,500	72,427,500	99.42	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
14	Pendampingan Program Nasional Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat dan JSLU	104,169,000	104,144,000	99.98	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
15	Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lainnya	45,398,700	44,498,700	98.02	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
16	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	71,150,000	66,812,500	93.90	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
17	Peningktn. Kualitas SDM Lembaga Sosial	408,845,000	406,025,000	99.31	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
18	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	68,740,000	68,740,000	100.00	Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
19	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	3,251,000	2,910,500	89.53	Sekretariat
20	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	3,251,000	2,500,200	76.91	Sekretariat
21	Fasilitasi, Pemantauan dan Penyaluran Bencana	76,720,000	73,936,125	96.37	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
22	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	539,249,450	510,136,957	94.60	Sekretariat
	Jumlah	7,988,546,100	7,576,149,741	94.84	

AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN 2016	REALISASI	%	NO	KEGIATAN	ANGGARAN 2017	REALISASI	%
I	Program Administrasi Perkantoran	297,700,700	287,047,359	96.42	I	Program Administrasi Perkantoran			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203,400,000	196,969,600	96.84	II				
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24,449,500.	17,361,000	71.01	III				
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya				IV				
	Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	450,169,750	431,685,250	95.89	V	Program: Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			
22	Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Keluarga Miskin	820,234,000	770,409,500	93.93					
21	Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial								
	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi AT, Anjal, AD, dan anak nakal								
	Pelayanan dan penanganan anak putus sekolah dan ABH								
	Pendayagunaan penca dan eks trauma								
	Rehabilitasi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas								
	Pemberdayaan bagi PMKS								

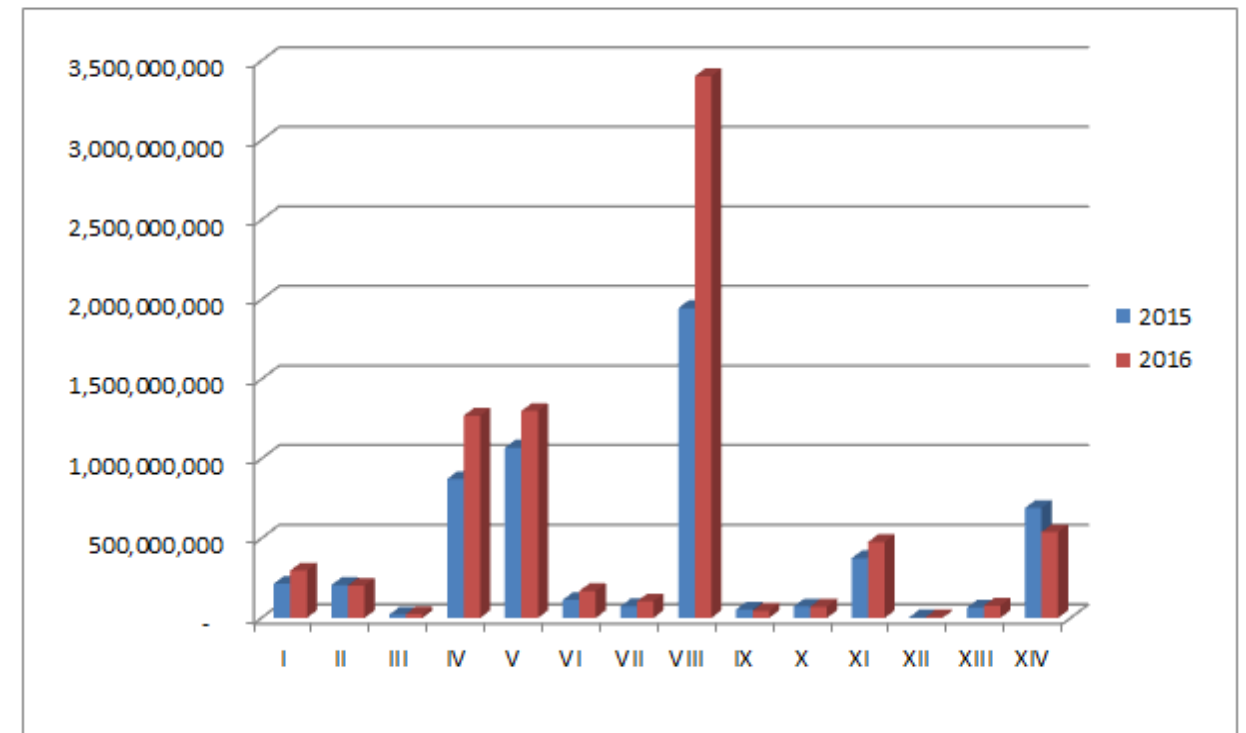
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN 2016	REALISASI	%					
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
23	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	307,678,000	298,733,000	97.09					
24	Pendampingan Anak Yatim Piatu	852,000,000	838,550,000	98.42					
25	Penanganan Jenazah terlantar	72,080,000	71,930,000	99.79					
26	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan penanganan permasalahan lansia	68,250,000	66,842,500	97.94					
VI	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
27	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	168,870,000	167,625,000	99.26					
VII	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma								
28	Pendampingan Program Nasional Jaminan Sosial bagi Penca Berat dan JSLU	104,169,000	104,144,000	99.98					
VIII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
29	Pelaksanaan Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	2,311,135,000	2,092,735,050	90.55					
30	Penyelenggaraan Festival Anak Soleh	196,740,000	195,660,000	99.45					
31	Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Monumen	22,000,000	22,000,000	100					

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN 2016	REALISASI	%					
32	Pemberdayaan Kaum Rois & Penjaga Masjid	800,212,500	766,470,000	95.78					
33	Pelatihan Manajemen Pengelola Tempat Ibadah	72,852,500	72,427,500	99.42					
IX	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial								
34	Penjaringan kerja penanganan Anjal, Gepeng, & Peny. Sos lainnya	45,398,700	44,498,700	98.02					
X	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
36	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	408,845,000	406,025,000	99.31					
37	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	68,740,000	68,740,000	100.00					
XI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
38	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	3,251,000	2,910,500	89.53					
39	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	3,251,000	2,500,200	76.91					
XII	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam								
40	Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana	76,720,000	73,936,125	96.37					

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN 2016	REALISASI	%					
XIII	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								
41	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	539,249,450	510,136,957	94.60					
	TOTAL	7,988,546,100	7,576,149,741						

Keterangan

- I Program Administrasi Perkantoran
- II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- IV Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya
- V Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- VI Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- VII Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
- VIII Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- IX Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- X Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- XI Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- XII Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- XIII Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- XIV Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan



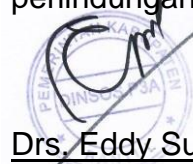
Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal Maret 2018
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak



Drs. Eddy Susanto
NIP. 196102081984031005